

STRATEGI DINAS PARIWISATA DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI WISATA BUDAYA DI KABUPATEN MINAHASA¹

Oleh : Cintania Mongkol²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan atas dasar masih rendahnya tingkat kunjungan wisatawan baik itu domestik dan mancanegara ke kabupaten Minahasa. Padahal sektor pariwisata adalah salah satu sektor andalan kabupaten ini untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Data Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 (periode 5 tahun) memperlihatkan tingkat kunjungan wisatawan ke kabupaten Minahasa tidak pernah mencapai angka 500 orang. Padahal target kunjungan yang ditetapkan adalah mencapai 1500 orang per tahun. Penelitian ini mencoba menemukan jawaban tentang kebijakan atau strategi dari Dinas Pariwisata kabupaten Minahasa dalam mengembangkan potensi wisata budaya yang dimiliki oleh kabupaten ini. hal ini berkaitan erat dengan rendahnya tingkat kunjungan wisatawan ke kabupaten ini. Diharapkan dari penelitian ini dapat ditemukan penyebab belum berhasilnya Dinas Pariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsi yang diemban.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan menggunakan konsep strategi dari Rangkuti (2004:4) sebagai rujukan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Dinas Pariwisata kabupaten Minahasa, menjadikan promosi sebagai strategi utama untuk mengembangkan potensi wisata budayanya. Kegagalan disebabkan bahwa promosi belum dilaksanakan secara optimal. Baik dari itu pemanfaatan media maupun fasilitas-fasilitas promosi lainnya.

Dari penelitian ini disimpulkan bahwa ketidakberhasilan bersumber pada tidak dilaksanakannya berbagai standar pengembangan kepariwisataan yang seharusnya dilakukan (pengembangan infrastruktur, promosi, dan penguatan sumber daya manusia, pelibatan sektor swasta). Saran yang ditawarkan adalah pengembangan infrastruktur pariwisata dengan dukungan dana yang nyata, melibatkan sektor swasta dan penguatan sumber daya manusia di sektor ini.

Kata Kunci: Strategi ,Promosi, Infrastruktur, Pariwisata

PENDAHULUAN

A. latar Belakang Masalah.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2017 dan Peraturan Daerah nomor 24 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2010-2025 kabupaten

¹ Merupakan skripsi penulis

² Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT Manado

Minahasa, menetapkan daerahnya sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Sulawesi Utara. Adapun arah kebijakan pengembangan pariwisata di daerah ini adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pendapatan masyarakat melalui kepariwisataan.
2. Pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penerimaan pendapatan daerah meliputi : perencanaan berlanjutnya pembangunan Benteng Moraya yang akan dijadikan tempat wisata budaya kuliner, pembangunan jembatan 300 meter di Danau Tondano, dan juga pengembangan wisata di puncak Urongo dan Pantai Mahembang. Perencanaan selanjutnya meliputi area pantai di bagian Timur Kabupaten Minahasa yang juga telah di senangi oleh masyarakat yang ada seperti pantai Tumpaan, pantai parentek, pantai kora-kora, pantai kolongan, dan lainnya.
3. Peningkatan kemampuan anggota masyarakat untuk dapat memperoleh manfaat yang besar bagi kegiatan pariwisata.
4. Terwujudnya masyarakat sadar wisata melalui sapta pesona, sehingga tercipta suasana yang mendukung dan menunjang semakin berkembangnya usaha dan kegiatan kepariwisataan.

Sebagai salah satu daerah destinasi wisata, kabupaten Minahasa, memiliki berbagai tempat dan budaya yang dapat dikembangkan, seperti wisata alam di dalamnya terdapat wisata alam Bukit kasih, Danau Tondano, air terjun sonder, wisata sejarah goa Jepang, Watu pinabetengan .wisata seni dan budaya atau wisata lainnya seperti tarian daerah Kabupaten Minahasa seperti diantaranya tarian Maengket, Cakalele Kabasaran, Katrili, Kumandong, Lengso.

Kenyataannya, angka kunjungan wisatawan baik domestik maupun manca negara ke kabupaten ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, angka kunjungan wisatawan per tahunnya belum pernah mencapai angka 500 orang (Badan Pusat Statistik Minahasa, 2015), padahal target pemerintah daerah kabupaten adalah 1500 orang per tahunnya.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas maka dalam studi ini diarahkan untuk mencapai tujuan, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimana strategi Dinas Pariwisata dalam mengembangkan potensi wisata budaya di Kabupaten Minahasa?

C. Tujuan Penelitian.

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Pariwisata kabupaten Minahasa dalam mengembangkan potensi wisata dan budaya di kabupaten Minahasa.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Strategi Pengelolaan Pariwisata.

Strategi merupakan sekumpulan cara secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah perencanaan dalam kurun waktu tertentu. (Rangkuti 2004:4) mengatakan bahwa strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai keunggulan bersaing. Hamel dan pharalad dalam (Rangkuti 2004:4) Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental atau senantiasa meningkat dan terus menerus dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang di harapkan oleh pelanggan di masa depan. Dirgantoro (2002:7) Strategi adalah hal sehubungan dengan menetapkan arah bagi perusahaan dalam arti sumber daya yang ada dalam perusahaan serta bagaimana mengidentifikasi kondisi yang memberikan keuntungan terbaik untuk membantu memenangkan pertandingan di pasar.

Konsep strategi menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert Jr. (2001:1-2) mendefinisikan konsep strategi berdasarkan 2 perspektif yang berbeda yaitu : (1) perspektif apa organisasi ingin dilakukan (2) dari perspektif apa yang akhirnya organisasi lakukan. Yang artinya berdasarkan perspektif yang pertama konsep strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan implementasi misinya. Dan yang kedua, perspektif dapat didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respons organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu.

Konsep UNDP and WTO. 1981 hal 69 (Tourism Development Plan dan World Tourism Organization) mengenai pengembangan wisata di suatu daerah yaitu: interaksi tidak langsung, model pengembangan ini didekati dengan cara bahwa daerah atau desa mendapat manfaat tanpa interaksi langsung dengan wisatawan. Dan interaksi langsung, wisatawan dimungkinkan untuk tinggal atau bermalam dalam akomodasi yang dimiliki oleh desa atau daerah tersebut.

B. Faktor-faktor yang berperan dalam Pengembangan Industri Pariwisata Daerah.

Pendit Nyoman, 2002:33-35) menjelaskan bahwa faktor-faktor yang berperan dalam industri daerah adalah :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu kunci sukses pariwisata di Indonesia adalah *human resources development* diberbagai subsistem pariwisata tersebut. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan industri pariwisata terutama ketika pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah.

2. Promosi Kepariwisataaan

Upaya-upaya pengenalan potensi-potensi budaya dan alam di daerah-daerah Indonesia dilakukan dengan jalan melakukan promosi kepariwisataan. Pada abad 21, di mana perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi demikian pesat maka diperkirakan akan terjadi persaingan di pasar global khususnya persaingan di bidang industri pariwisata. Oleh karenanya promosi kepariwisataan merupakan suatu strategi yang harus dilakukan secara berkesinambungan baik di tingkat internasional maupun regional.

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, maka masing-masing daerah diharapkan mampu menarik pars wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata yang ada di Indonesia dengan jalan semakin meningkatkan promosi kepariwisataannya. Adalah kenyataan pahit ketika indutri pariwisata di Indonesia mengalami krisis mulai tahun 1997 sampai dengan memasuki tahun 2000 sebagai akibat ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi. Merosotnya jumlah wisatawan di daerah-daerah tujuan wisam selama ini merupakan bukti bahwa situasi dan kondisi politik suatu negara berdampak pada terganggunya seluruh kegiatan kepariwisataan. Prospek industri pariwisata di tahun 2000 ini tergantung pada banyak faktor. Dalam hal ini aspek promosi merupakan salah faktor penentu pengembangan potensi pariwisata khususnya di daerah-daerah Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa promosi memainkan peran kunci dalam kinerja masa mendatang industri pariwisata Indonesia.

3. Sarana dan Prasarana Kepariwisataaan

Motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan akan menimbulkan permintaan-permintaan yang sama mengenai prasarana dan sarana kepariwisataan seperti jaringan telekomunikasi, akomodasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini kesiapan sarana dan prasarana kepariwisataan merupakan salah satu faktor penentu berhasilnya pengembangan industri pariwisata daerah. Terlebih ketika program otonomi telah diterapkan, maka masing-masing daerah dituntut untuk lebih memberikan perhatiannya pada penyediaan sarana prasarana kepariwisataan yang memadai dan paling tidak sesuai dengan standar intemasional.

Ketiga faktor di atas merupakan faktor kritis yang perlu mendapat perhatian serius dalam rangka pengembangan industri pariwisata daerah. Tujuan pengembangan industri pariwisata daerah dapat tercapai apabila ketiga faktor tersebut dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Hanya saja perlu disadari bahwa pengembangan pariwisata sebagai industri memerlukan biaya yang tidak sedikit. Terlebih dengan mulai diterapkannya otonomi daerah, maka pola perencanaan yang terpadu mutlak diperlukan sebelum mulai dengan pengembangan industri pariwisata.

Pada dasarnya, perencanaan bermaksud memberi batasan tentang tujuan yang hendak dicapai dan menentukan cara mencapai tujuan yang dimaksudkan. Dengan demikian pengembangan industri pariwisata suatu daerah perlu mempertimbangkan segala macam aspek. Ini disebabkan industri pariwisata merupakan industri jasa yang tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi selalu berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai sektor lain. Jadi maju mundurnya industri pariwisata tidak hanya tergantung pada sektor pariwisata saja.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.

Penelitian ini adalah studi kasus yang merupakan tipe penelitian kepada satu kasus dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dan komprehensif. Pada tipe penelitian ini seseorang atau suatu kelompok yang diteliti permasalahannya, ditelaah secara komprehensif, mendetail dan mendalam, dengan pendekatan kualitatif.

B. Fokus Penelitian.

Penelitian ini di fokuskan pada strategi pengelolaan pariwisata yang ada di Kabupaten Minahasa, melalui objek wisata/situs Budaya, yang dapat lebih dirinci sebagai berikut:

1. Prioritas pengelolaan pariwisata.
2. Anggaran pengelolaan pariwisata.
3. Promosi kepariwisataan
4. Strategi pengembangan kepariwisataan.

C. Informan Penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Minahasa.
2. Kepala Bidang Kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Minahasa.
3. Kepala Seksi Objek Wisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Minahasa
4. 1 orang informan wisatawan.

Dengan demikian jumlah informan dalam penelitian ini adalah 5 orang.

D. Jenis Data.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

E. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam, observasi langsung di lapangan, dan penelusuran berbagai dokumentasi yang dinilai terkait dengan masalah penelitian.

F. Teknik Analisa Data.

Teknik analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui proses Reduksi data (Data Reduction), Display data (Data Display), dan Penggambaran Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil-hasil wawancara yang diperoleh melalui informan, pada bagian ini peneliti akan membahas strategi pengelolaan kepariwisataan yang semestinya harus didukung oleh:

- a. Kebijakan Operasional pengembangan Objek dan Daya tarik wisata.
Kebijakan Operasional yang dimaksud mencakup penetapan atas pusat-pusat wilayah pengembangan obyek atas dasar analisa struktur rencana tata ruang pengembangan kawasan pariwisata dengan memperhatikan usaha pengembangan fasilitas Infra dan supra struktur, daya dukung lingkungan, serta nilai daya tarik obyek wisata unggulan yang dianggap, memiliki karakteristik daya tarik yang paling menonjol berdasarkan nilai atraktif yang dimiliki dan didukung fasilitas sarana dan prasarana yang tersedia.
- b. Kebijakan Operasional Pengembangan Sarana Wisata.
Dalam kebijakan ini mencakup penetapan keputusan mengenai klasifikasi hotel, penginapan dan rumah makan atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan keputusan mengenai pengaturan pembentukan asosiasi hotel/penginapan dan rumah makan sebagai wadah pembinaan pengembangan usaha sarana wisata daerah, dan penetapan keputusan mengenai pembentukan tim Pembina pengelola dan pengawasan pengembangan sarana usaha wisata daerah.
- c. Kebijakan Operasional Pengembangan Promosi Wisata Daerah.
Hal-hal yang terkait dalam kebijakan ini antara lain mencakup penetapan keputusan mengenai pengaturan dalam pembentukan organisasi biro perjalanan wisata daerah, penetapan keputusan mengenai pengelolaan media promosi kepariwisataan daerah, penyelenggaraan pengembangan kegiatan atraksi wisata serta pengembangan pembinaan dan pelayanan pemasaran wisata daerah.

Dari rumusan kebijakan pengembangan kepariwisataan yang telah dikemukakan di atas maka pedoman penyusunan rencana pelaksanaan pengembangan yang dilakukan, arah, dan sasaran pengembangannya dijabarkan, sebagai berikut: Dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah perlu diarahkan pada peningkatan kualitas perumusan program dan prioritas rencana pengembangan kepariwisataan secara terpadu antara instansi terkait, dengan didukung kemampuan aparatur dalam pelaksanaan tugas pengembangan

penyelenggaraan urusan kepariwisataan yang menjadi kewenangan daerah.

Pembinaan pemasyarakatan aset pariwisata daerah perlu diarahkan kepada usaha untuk lebih memperkenalkan kekayaan budaya dengan tetap ditunjang sebagai usaha pengembangan atas obyek dan daya tarik wisata dengan jalan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai pada setiap kawasan obyek wisata yang ada. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata perlu diarahkan kepada penetapan obyek wisata andalan dengan didukung peningkatan mutu atas kondisi sarana dan prasarana yang ada serta diikuti oleh upaya pelestarian lingkungan hidup. Pengembangan kepariwisataan daerah dalam rangka peningkatan atas sumber penerimaan daerah perlu diarahkan pada penyempurnaan dan peningkatan unsur bina wisata, pemasaran produk wisata serta penetapan peraturan daerah mengenai izin usaha dalam pengelolaan pada suatu kawasan wisata.

Titik berat bidang promosi wisata, melalui peningkatan mutu informasi, bimbingan dan pemasaran obyekwisata budaya, obyek wisata alam maupun obyek wisata minat khusus. Untuk mencapai peningkatan mutu dimaksud maka titik berat pengembangan bidang promosi wisata ini perlu didukung dengan pola kerjasama terpadu antara pihak pemerintah daerah, swasta maupun satuan-satuan organisasi pengendalian dan pelestarian budaya dan lingkungan hidup.

Bagi Minahasa, industri pariwisata merupakan suatu komoditi prospektif yang di pandang mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional, sehingga tidak mengherankan apabila Indonesia menaruh perhatian khusus kepada industri pariwisata. Hal ini lebih diperkuat dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia memiliki potensi alam dan kebudayaan yang cukup besar yang dapat dijadikan modal bagi pengembangan industri pariwisatanya. Salah satu tujuan pengembangan kepariwisataan di Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja dan mendorong kegiatan-kegiatan industri-industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya.

Dalam orde reformasi ini, merupakan momentum awal yang sangat tepat bagi daerah untuk lebih mandiri dalam menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya. Kemandirian daerah ini terwujud dalam pemberian kewenangan yang cukup besar meliputi kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama

Penyerahan kewenangan tersebut disertai juga dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut. Merupakan konsekuensi logis bagi daerah dengan adanya penerapan otonomi daerah maka segala sesuatu yang bersifat operasional dilimpahkan kepada daerah.

Sehubungan dengan penerapan otonomi daerah maka segala sesuatu yang menyangkut pengembangan industri pariwisata meliputi pembiayaan, perizinan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi menjadi wewenang daerah untuk menyelenggarakannya. Dengan demikian masing-masing daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam mengembangkan obyek dan potensi wisatanya, termasuk pembiayaan promosinya.

Sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Sumber pendapatan asli daerah merupakan sumber keuangan daerah yang digali dan dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dilihat dari sisi PAD maka ada beberapa daerah di Indonesia yang miskin akan sumber daya alam sehingga tidak dapat mengandalkan PAD-nya dari hasil sumber daya alam. Oleh karenanya pengembangan industri pariwisata suatu daerah menjadi alasan utama sebagai salah satu upaya meningkatkan PAD melalui pemanfaatan potensi-potensi daerah setempat. Pada tahun 1997, industri pariwisata Indonesia diperkirakan menghasilkan pajak tidak langsung sejumlah 8,7% dari keseluruhan nilai pajak tidak langsung dan pada tahun 2007 meningkat sebesar 9,6% dari total keseluruhan. Data tersebut menunjukkan bahwa industri pariwisata Indonesia memberikan kontribusi yang cukup besar di bidang perpajakan.

Sektor pajak mempunyai peranan penting dalam budget negara. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin negara, juga dipergunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Oleh karenanya, kontribusi pajak bagi pembangunan diharapkan tidak saja mendorong pembangunan satu wilayah saja, akan tetapi juga dapat mendorong pembangunan secara merata sampai di daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Dalam ruang lingkup daerah, kontribusi industri pariwisata di bidang perpajakan diharapkan semakin meningkat dengan jalan melakukan pengembangan dan pendayagunaan potensi-potensi pariwisata daerah. Hanya saja pungutan pajak tersebut harus dilakukan secara bijaksana, artinya pungutan pajak harus tetap berpegang pada prinsip keadilan, kepastian hukum dan kesederhanaan. Dalam menuju kemandirian daerah, potensi industri pariwisata daerah yang dikelola dan dikembangkan dengan baik akan meningkatkan penerimaan di bidang perpajakan. Dalam hal ini kontribusi pajak dan industri pariwisata daerah selain sebagai sumber PAD, juga dimaksudkan untuk membiayai pembangunan daerah.

Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu daerah berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari industri pariwisata yang berkembang dengan baik. Misalnya dengan dibangunnya sarana prasarana di daerah tersebut maka tenaga kerja akan banyak tersedot dalam proyek-proyek seperti pembangkit tenaga listrik, jembatan, perhotelan dan lain sebagainya.

Untuk mengembangkan industri pariwisata suatu daerah diperlukan strategi-strategi tertentu maupun kebijakan-kebijakan baru di bidang kepariwisataan. Sebuah gagasan menarik dari Sri Sultan HB X yang menyodorkan konsep kebijakan pariwisata borderless, yaitu suatu konsep pengembangan pariwisata yang tidak hanya terpaku pada satu obyek untuk satu wilayah,

sedangkan pola distribusinya harus makin dikembangkan dengan tidak melihat batas geografis wilayah.

Gagasan tersebut memberi angin segar bagi dunia kepariwisataan di Indonesia terlebih dengan diterapkannya sistem otonomi daerah. Paling tidak kebijakan baru tersebut menjadi salah satu alternatif yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan dan mendayagunakan potensi-potensi wisata daerah melalui program kerjasama antar daerah. Namun demikian yang perlu mendapat perhatian di sini bahwa penerapan program kerjasama tersebut jangan sampai menimbulkan konflik yang justru berdampak merugikan, sehingga tujuan dan pengembangan pariwisata daerah menjadi tidak tercapai.

Upaya pengembangan industri pariwisata terutama dalam menghadapi otonomi daerah berkaitan erat dengan berbagai faktor. Oleh karena itu perlu dipahami faktor-faktor yang secara faktual berperan dalam pengembangan industri pariwisata khususnya di daerah-daerah, yaitu (Pendidit Nyoman, 2002:33-35):

a. Kualitas Sumber Daya Manusia

Salah satu kunci sukses pariwisata di Indonesia adalah human resources development diberbagai subsistem pariwisata tersebut. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang berkualitas memegang peranan yang sangat penting dalam pengembangan industri pariwisata terutama ketika pemerintah Indonesia mulai menerapkan kebijakan otonomi daerah. Profesionalisme sumber daya manusia Indonesia merupakan suatu tuntutan dalam menghadapi persaingan global dimana sumber daya manusia yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia yang berkualitas, mempunyai gagasan, inovasi dan etos kerja profesional. Tentu tidak mudah untuk memperoleh tenaga-tenaga profesional di bidang pariwisata paling tidak harus ada upaya-upaya untuk meningkatkan keahlian dan ketrampilan tenaga kepariwisataan, sehingga pada akhirnya peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama di daerah – daerah tujuan wisata berpengaruh positif pada perkembangan industri pariwisata daerah.

b. Promosi Kepariwisata

Upaya-upaya pengenalan potensi-potensi budaya dan alam di daerah-daerah Indonesia dilakukan dengan jalan melakukan promosi kepariwisataan. Pada abad 21, di mana perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi demikian pesat maka diperkirakan akan terjadi persaingan di pasar global khususnya persaingan di bidang industri pariwisata. Oleh karenanya promosi kepariwisataan merupakan suatu strategi yang harus dilakukan secara berkesinambungan baik di tingkat internasional maupun regional.

Sehubungan dengan kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, maka masing-masing daerah diharapkan mampu menarik pars wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata yang ada di Indonesia dengan jalan semakin meningkatkan promosi kepariwisataannya.

Adalah kenyataan pahit ketika industri pariwisata di Indonesia mengalami krisis mulai tahun 1997 sampai dengan memasuki tahun 2000 sebagai akibat ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi. Merosotnya jumlah wisatawan di daerah-daerah tujuan wisata selama ini merupakan bukti bahwa situasi dan

kondisi politik suatu negara berdampak pada terganggunya seluruh kegiatan kepariwisataan.

Prospek industri pariwisata di tahun 2000 ini tergantung pada banyak faktor. Dalam hal ini aspek promosi merupakan salah faktor penentu pengembangan potensi pariwisata khususnya di daerah-daerah Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa promosi memainkan peran kunci dalam kinerja masa mendatang industri pariwisata Indonesia.

c. Sarana dan Prasarana Kepariwisata

Motivasi yang mendorong orang untuk mengadakan perjalanan akan menimbulkan permintaan-permintaan yang sama mengenai prasarana dan sarana kepariwisataan seperti jaringan telekomunikasi, akomodasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini kesiapan sarana dan prasarana kepariwisataan merupakan salah satu faktor penentu berhasilnya pengembangan industri pariwisata daerah. Terlebih ketika program otonomi telah diterapkan, maka masing-masing daerah dituntut untuk lebih memberikan perhatiannya pada penyediaan sarana prasarana kepariwisataan yang memadai dan paling tidak sesuai dengan standar internasional.

Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola obyek dan daya tarik wisata beserta prasarana dan sarana yang diperlukan. Dengan demikian perlu adanya pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana di daerah-daerah tujuan wisata untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata.

Sarana prasarana tempat merupakan unsur pokok dalam mata rantai kegiatan industri pariwisata. Apabila pembenahan dan pengelolaan sarana prasarana kepariwisataan ditelantarkan akan berakibat pada tidak tercapainya dampak positif industri pariwisata dalam peningkatan PAD, penciptaan lapangan kerja dan sebagai pendorong pembangunan daerah.

Ketiga faktor di atas merupakan faktor kritis yang perlu mendapat perhatian serius dalam rangka pengembangan industri pariwisata daerah. Tujuan pengembangan industri pariwisata daerah dapat tercapai apabila ketiga faktor tersebut dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan. Hanya saja perlu disadari bahwa pengembangan pariwisata sebagai industri memerlukan biaya yang tidak sedikit. Terlebih dengan mulai diterapkannya otonomi daerah, maka pola perencanaan yang terpadu mutlak diperlukan sebelum mulai dengan pengembangan industri pariwisata.

Pada dasarnya, perencanaan bermaksud memberi batasan tentang tujuan yang hendak dicapai dan menentukan cara mencapai tujuan yang dimaksudkan. Dengan demikian pengembangan industri pariwisata suatu daerah perlu mempertimbangkan segala macam aspek. Ini disebabkan industri pariwisata merupakan industri jasa yang tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi selalu berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan berbagai sektor lain. Jadi maju mundurnya industri pariwisata tidak hanya tergantung pada sektor pariwisata saja.

PENUTUP

Kesimpulan.

Dari seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam prioritas pengelolaan kepariwisataan melalui dukungan alokasi anggaran yang masih minim, sehingga belum mampu memaksimalkan objek wisata yang ada, terlebih dalam dukungan infrastruktur pariwisata.
2. Promosi Kepariwisataan yang belum efektif, karena hanya sebatas promosi lewat brosur, stiker, pamphlet, ataupun pameran-pameran, yang tidak dapat menjangkau masyarakat luas, apalagi sampai tingkat mancanegara, hal ini diperburuk dengan tidak adanya promosi yang dilakukan melalui website, diakibatkan belum tersedianya website khusus yang dikelola oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Minahasa.
3. Respond dan partisipasi masyarakat dalam mendukung pengembangan pariwisata di Danau Tondano, dinilai lamban direspon oleh pemerintah Kabupaten Minahasa, khususnya Dinas Pariwisata, dimana sampai dengan saat ini belum dikelola secara khusus, baik oleh pemerintah, maupun pihak swasta.

Saran.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran dalam penelitian ini adalah:

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa diharapkan menambah alokasi anggaran dalam pengelolaan kepariwisataan yang ada, untuk menunjang pembangunan infrastruktur kepariwisataan, khususnya lokasi wisata Danau Tondano.
2. Pemerintah Kabupaten Minahasa, melalui Dinas Pariwisata perlu meningkatkan promosi kepariwisataan, bukan hanya melalui stiker, brosur, pamphlet, atau mengikuti pameran, tetapi lebih kepada promosi internasional untuk wisatawan mancanegara.
3. Perlu ditingkatkan respon pemerintah kabupaten dalam menyambut sikap positif masyarakat dalam mendukung dikembangkannya kepariwisataan yang ada di Kepulauan Minahasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Azhar, 2003. *Manajemen Pengetahuan Praktis Bagi Pimpinan & Eksekutif, Manajemen Strategik*. Yogyakarta ; Pustaka Pelajar.
- Haris, Amirullah, dan Budiyono, 2004. *Pengantar Manajemen.*, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Lundberg, D.E., M.H. Stavenga, M. Krishnamoorthy. 1997. *Ekonomi Pariwisata*. dalam: I Wayan Geriya, *Diplomasi Keunggulan Budaya*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Marpaung Happy. 2004. *Pengetahuan Kepariwisataan*. Alfabeta. Bandung.

- Marpaung Happy dan Herman Bahar. 2002. *Pengantar Pariwisata*. Alfabeta, Bandung.
- Nisjar, Kahri & Winardi. 1997. *Manajemen Strategik*. Mandar Maju Bandung.
- PB, Triton. 2007. *Manajemen strategis, Terapan Perusahaan dan Bisnis*. Tugu.Yogyakarta.
- Pendit Nyoman S. 2002. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*. Pradnya Paramita. Jakarta.